

KASN Bicara Rombak Pejabat:

Anies Berikan Potongan Koran, Ahok Sodorkan Bukti

Selasa, 31 Juli 2018 10:12



ISTIMEWA Foto pelantikan lima wali kota Jakarta dan satu bupati Kepulauan Seribu di gedung Balai Kota DKI Jakarta kemarin, Kamis (5/7/2018).

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kontroversi perombakan wali kota oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat perhatian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sampai caranya dibandingkan dengan Ahok.

Saling membela diri tak terhindarkan ketika Anies menilai cara Ketua KASN Sofian Effendi sangat politis karena mempublikasikan pelanggaran dalam perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta melalui rilis ke wartawan.

Anies pun mengaku tak akan melakukan hal sama seperti yang dilakukan Ketua KASN, tapi memilih menanggapi secara profesional melalui pernyataan tertulis atas perombakan pejabat bawahannya.

Menurut Anies, hal wajar apabila antarinstansi pemerintahan saling berkirim surat.

"Saya ketika lihat itu pakai *press release* segala, saya bilang, 'Wah ini Pak Ketua berpolitik, saya enggak mau ikut,'" ujar Anies kepada wartawan pada Minggu (29/7/2018).



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan istrinya Fery Farhati Ganis (kanan) di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (29/7/2018). (TribunJakarta.com/Pebby Ade Liana)

"Antarinstansi pemerintah itu biasa kok saling berkirim surat. Tapi ketika ada *press release* dari KASN, saya berpikir kok jadi seperti kegiatan politik ya. Karena justru pertanyaan saya itu, kok jadi Ketua KASN berpolitik. Ini kan membentuk opini, itu sebuah proses politik," tutur dia.

Dalam rilisnya tersebut, KASN memberikan beberapa rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta.

Satu di antaranya segera mengembalikan pejabat yang sudah di-nonaktifkan dan jika ada bukti yang memperkuat pelanggaran para pejabat yang diberhentikan agar diserahkan dalam waktu 30 hari.

Anies menegaskan akan mengirimkan surat jawaban kepada pihak KASN tanpa harus mengeluarkan rilis.

"Kami tidak akan bikin *press release*, kami tidak akan berpolitik dalam urusan ini. (Tanya) Pak Sekda aja. Cukup Pak Sekda itu sih. Biar KASN berpolitik saja, saya kerja profesional," sambung dia.

Curi perhatian

Ketua KASN Sofian Effendi membantah tudingan Anies yang menyebutnya bersikap politis.

Menurut Sofian, KASN sebagai lembaga pemerintah yang bebas dari intervensi politik.

"Kami ini justru lembaga yang dibentuk UU untuk mengawasi ASN, yang tidak diintervensi secara politik. Dan syarat kami dipilih adalah bukan anggota parpol, tidak aktif di politik," ujar Sofian ketika dihubungi seperti dilansir Kompas.com pada Senin (30/7/2018).

"Kalau gubernur bilang dia profesional, Pak Sofian yang politik, bukannya terbalik?" ucap Sofian.

Sofian mengaku sudah menempuh prosedur birokratis untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, melalui wawancara, surat dan pemanggilan.



Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Sofian Effendi. (Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado)

Ia mengungkapkan surat hasil penyelidikan KASN terakhir sudah dibalas Pemprov DKI, namun, surat-surat dari KASN ke Pemprov DKI sebelumnya sering kali tidak direspons.

"Kalau surat-surat, kami dicuekin," kata Sofian.

Sehingga pihaknya mencari cara agar Pemprov DKI Jakarta perhatian dan menanggapi KASN.

"Jadi kami harus cari strategi lain. Kami kan sudah melalui wawancara, melalui surat, pemanggilan. Kami sudah dapat data dari mereka yang diberhentikan itu. Kalau dicuekin lagi, kami ambil cara yang lebih efektif," ujar Sofian.

"Kelihatannya melalui press release ini lebih efektif," ia menambahkan.

Sepotong koran

Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memberikan alasan pencopotan pejabat yang dilakukan Gubernur Anies, demikian ungkap Ketua KASN Sofian Effendi dalam wawancaranya dengan [Kompas.com](https://www.kompas.com).

KASN, kata Sofian, hanya mendapatkan bukti berupa potongan berita di media massa dari Pemprov DKI Jakarta terkait kinerja pejabat tersebut.

"Ada hasil pemeriksaannya yang ditandatangani yang bersangkutan, itu yang seharusnya dijadikan bahan bukti. Nah sekarang yang dikirim ke kami cuma guntingan-guntingan koran. Itu kan bukan barang bukti kalau cuma guntingan koran," ujar Sofian.

Lazimnya, seorang pejabat distafkan karena melanggar. Ini berbeda jika pejabat itu hanya dirotasi ke jabatan lain dengan tingkat eselon yang sama.

Gubernur Anies merombak sejumlah pejabat kemudian distafkan tanpa tahu penyebabnya, satu di antaranya mantan Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi.

"Kalau dari bukti-bukti itu yang bersangkutan memang kinerjanya rendah setelah digaji tinggi, memang boleh diberhentikan atau didemosi," kata Sofian.

Ia menegaskan pemberhentian juga tidak bisa sewenang-wenang dan harus diberi peringatan lebih dulu tapi tidak terjadi.

KASN menilai di sinilah terjadi pelanggaran prosedur, tidak mempersoalkan kewenangan gubernur mencopot bawahannya.

"Jangan karena gubernurnya enggak senang, dipecat, diganti begitu saja. Ini kan bukan dirotasi, padahal mereka masih lama dari usia pensiun. Bayangkan misalnya seorang pimred dipecat jadi calon wartawan. Itu yang terjadi," tambah dia.

Beda Ahok

Tak sekali ini KASN meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan alasannya merombak pejabat lalu menjadikannya staf.

Sebelum era Anies-Sandi memimpin Jakarta, KASN pernah menyoal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yang doyan gonta-ganti dan memecat pejabat.



Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melayani langsung pengaduan Warga Menteng, Jakarta Pusat tentang sengketa tanah yang dialaminya dengan orang lain. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu melayani warga di pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, usai mendatangi Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT OKI) 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016). TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
(TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN)

Ahok saat mengganti pejabat, sambung Sofian, menyertakan bukti bahwa pejabat yang dicopot telah melalui proses pemeriksaan.

"Pak Ahok dulu kalau kami tegur, dia bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa pergantian itu dilakukan setelah melalui pemeriksaan. Ada buktinya," ujar Sofian seperti dilansir Kompas.com.

Era Ahok, publik terbiasa mendengar tak sekali dua pejabat dicopot dan distafkan.

KASN meminta hal yang sama kepada Gubernur Anies, yakni bukti seseorang pejabat pantas dicopot, bukan sekadar guntingan korban.

Beberapa pejabat yang diturunkan Anies menjadi staf, selain Tri Kurniadi adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul KASN Bicara Rombak Pejabat: Anies Berikan Potongan Koran, Ahok Sodorkan Bukti,

<http://jakarta.tribunnews.com/2018/07/31/kasn-bicara-rombak-pejabat-anies-berikan-potongan-koran-ahok-sodorkan-bukti?page=all>.

Penulis: Y Gustaman

Editor: Y Gustaman